

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah otonom, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan adanya penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Sehingga penerimaan paling sentral adalah pajak.

Pembangunan daerah adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak.

Pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang digunakan untuk membangun bangsa indonesia sebagian besar dibiayai dari

pendapatan pajak. Oleh karena itu dari tahun ke tahun, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah.

Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD. Kota Padang adalah ibukota dari provinsi Sumatera Barat yang artinya pusat pemerintahan di Sumbar itu terletak di Kota Padang. Infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau, serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Sentra perniagaan kota ini berada di pasar raya padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan belasan perguruan tinggi, termasuk tiga universitas negeri.

Pajak hotel termasuk dalam pajak daerah. Hotel merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektifitas penerimaan pajak hotel dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dapat memacu pembangunan ekonomi Kota Padang. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termamsuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

gubuk parawisata, wisma parawisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenis, serta rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Tabel 1.1

Data Jumlah Hotel di Kota Padang

Klasifikasi	Tahun		
	2016	2017	2018
Bintang V	1	1	1
Bintang IV	4	4	4
Bintang III	7	7	8
Bintang II	9	11	12
Bintang I	7	8	8
Melati	81	81	81
Kos / Losmen	17	54	58

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dilihat dari tahun ke tahun, perkembangan hotel di Kota Padang selalu mengalami peningkatan jumlahnya. Dengan meningkatnya jumlah hotel di Kota Padang diharapkan kontribusi dari penerimaan pajak yang diterima signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pada saat sekarang ini, pemerintah kota padang berupaya membangun destinasi wisata seni dan budaya Minangkabau yang berdaya saing. Berbagai kegiatan seni dan budaya digelar untuk memperkenalkan dan melestarikan

kebudayaan ranah minang. Salah satu *icon* wisata favorit di Kota Padang adalah Pantai Padang. Objek wisata yang memanjang di sisi barat Ibukota Provinsi Sumatera Barat ini hampir setiap hari ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun luar. Boleh dikatakan, yang datang berkunjung ke Kota Padang akan merasa rugi jika tidak menyempatkan singgah di pantai yang *sunset*-nya terlihat sangat indah ini. Selain itu Kota Padang memiliki berbagai macam destinasi wisata yang perlu dikunjungi seperti pantai carolina, jembatan siti nurbaya, pantai pasir jambak, pantai air manis museum adityawarman, dan masih banyak lagi. Maka penulis berminat untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“PERAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BAPENDA KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penerimaan hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.
2. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.
3. Apa saja kendala yang dihadapi Bapenda Kota Padang terkait penerimaan pajak hotel.

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan magang ini yaitu:

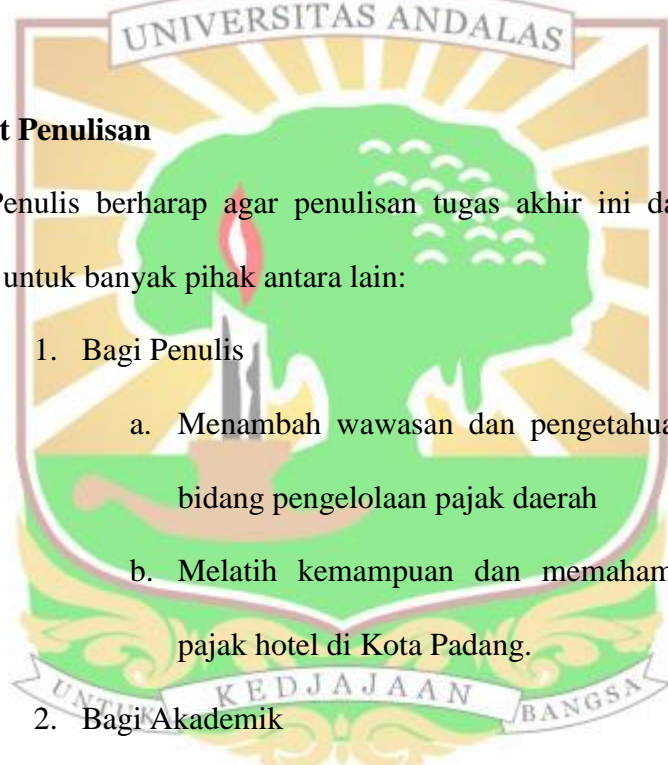
1. Untuk mengetahui seberapa besar peran penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan memahami apa-apa saja kendala yang dihadapi Bapenda Kota Padang terkait pajak hotel.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang pengelolaan pajak daerah
 - b. Melatih kemampuan dan memahami perkembangan pajak hotel di Kota Padang.
2. Bagi Akademik

Sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui keadaan perpajakan di Kota Padang dan menjadi bahan acuan bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa D3 Keuangan Negara.



3. Bagi Instansi

Tugas akhir ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja instansi sehingga dapat menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan pajak di Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan magang, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan peran penerimaan pajak hotel pada Bapenda Kota Padang.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini membahas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta visi, misi, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana peran penerimaan pajak hotel, perkembangan pajak hotel serta apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Bapenda Kota Padang terkait pajak hotel.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan dengan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis sesuai hasil pengamatan yang dilakukan.

